KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU PDP Ditargetkan Lolos Tahun ini
Tanggal : Selasa, 07 September 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

RUU PDP Ditargetkan Lolos Tahun Ini

Komisi I DPR sudah membahas 194 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari 317 DIM yang terdiri atas 15 bab dan 72 pasal dalam RUU PDP.

Cahya Mulyana
cahya@mediaindonesia.com

SERAYA menunggu kabar dari DPR ihwal kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), pemerintah menjalin lobi-lobi untuk mencari jalan tengah atas sejumlah isu krusial yang sempat menemui kebuntuan (*deadlock*).

Demikian penjelasan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

"Senin (1/9) pekan lalu, ada rapat kerja Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR. Salah satu kesimpulan berisi kesepakatan melanjutkan dan menyegerakan pembahasan agar RUU PDP menjadi undang-undang," kata Usman.

Pemerintah menargetkan RUU PDP segera disahkan tahun ini. "Kemudian mengenai isu yang masih *deadlock*, itu termasuk yang kita bahas untuk mendapatkan solusi. Lobi-lobi juga sudah dilakukan di luar rapat resmi," lanjut Usman.

Menurut Usman, pembahasan RUU ini telah melewati tenggat dalam peraturan pembentukan undang-undang. Komisi I akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembahasan kepada pimpinan dewan.

"Jadi, tindak lanjut dari kesepakatan melanjutkan pembahasan RUU menunggu (perpanjangan waktu) itu. Tanpa persetujuan penambahan masa (waktu), kita tidak bisa membahasnya," ujar Usman.

Dia mengemukakan Kementerian Kominfo dan Komisi I kembali menggelar rapat kerja hari ini atau besok (Rabu, 8/9).

"Pada pertemuan tersebut Pak Menteri Kominfo (Johnny G Plate) berharap ada pembahasan soal RUU PDP. Kami siap kapan pun pembahasannya dan lebih cepat lebih baik," ungkap Usman.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengemukakan pihaknya telah mengajukan perpanjangan masa sidang untuk pembahasan RUU PDP. Dengan demikian, nasib pembahasan regulasi usulan pemerintah ini menunggu persetujuan pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).

"Ini betul-betul proses politik rumit. Di satu sisi, ada batasan dalam aturan Tatib DPR untuk pembahasan RUU dan di sisi lain muncul desakan kebutuhan soal perlindungan data pribadi," kata politikus dari Partai NasDem tersebut.

Dia berharap sinergi dan komunikasi Komisi I dengan Kementerian Kominfo dipererat untuk menghadapi kondisi tersebut, termasuk komunikasi dengan pimpinan DPR dan Bamus.

Iktikad positif

Berdasarkan catatan, Komisi I sudah membahas 194 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari total 317 DIM yang terdiri atas 15 bab dan 72 pasal dalam RUU PDP tersebut.

"Jadi, itu capaian terakhir," tutur Farhan.

Anggota Komisi I Rizki Natakusumah pun menyambut baik keinginan pemerintah menuntaskan pembahasan RUU PDP. Beleid ini mendesak disahkan melihat sejumlah insiden penyalahgunaan data pribadi di ruang publik.

"Kami di Komisi I mendapatkan sinyal positif terkait keberlanjutan pembahasan RUU PDP. Soal lembaga pengawas pelaksanaan UU PDP, kami belum membahasnya. Namun, dengan maraknya penyalahgunaan data akhir-akhir ini, kami berharap pemerintah memahami pentingnya independensi lembaga ini. Kami *wait and see* kejelasan posisi Kementerian Kominfo. Tetapi kami menyambut baik iktikad positif dari Menteri Kominfo untuk melanjutkan pembahasan RUU PDP," tandas politikus dari Partai Demokrat ini. (X-3)

Percepatan Pembahasan RUU PDP

Sinyal Positif Pembahasan RUU PDP

- Disampaikan Menkominfo Johnny G Plate saat rapat bersama Komisi I DPR.
- Percepatan dilakukan antara Kemenkominfo dan DPR.
- Masa pembahasan oleh DPR untuk menyelesaikan RUU PDP diperpanjang.
- Target RUU PDP dapat diselesaikan tahun ini.
- Pembahasan terakhir RUU PDP baru mengupas 194 dari total 317 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri atas 15 bab dan 72 pasal.

Mengapa RUU PDP Penting Dipercepat?

- Kasus kebocoran data pribadi marak terjadi.
- Dibutuhkan aturan yang jelas terkait penggunaan data pribadi.
- Menghindari potensi tumpang-tindih aturan perlindungan data pribadi.

Beberapa Larangan yang Diatur dalam RUU PDP (Pasal 51)

- Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.
- Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.



Sumber: Kemkominfo/DPR/Litbang MI/ Grafis: SENO